

UPAYA REKONSILIASI POLITIK IDENTITAS PASCA PELAKSANAAN PEMILU 2019 DI INDONESIA RECONCILIATION EFFORTS OF IDENTITY POLITICS POST OF ELECTION 2019 IN INDONESIA

Anifatul Kiftiyah

Program Studi Magister Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Salah satu bentuk prinsip demokrasi tercermin pada pelaksanaan Pemilu. Lazimnya setiap pemilu diadakan maka masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden akan gencar melakukan kampanye untuk menarik suara masyarakat agar memilihnya. Bahkan tidak jarang politik identitas dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan. Politik identitas merupakan salah satu cara politis yang mengutamakan kepentingan sebuah kelompok karena adanya persamaan identitas baik agama, ideologi, ras, etnis, maupun gender. Terjadinya politik identitas di Indonesia dapat menimbulkan terjadinya polarisasi di masyarakat. Lalu bagaimana upaya untuk menghindari terjadinya polarisasi tersebut? Tulisan ini membahas bagaimana rekonsiliasi politik identitas pasca pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia. Kajian ini merupakan *library research* yang menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan objek kajian. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian Fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas masih secara massif digunakan dalam Pemilu yang dapat menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya rekonsiliasi yang akan dilakukan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya perpecahan.

Kata Kunci: Rekonsiliasi, Politik identitas, Pemilu.

ABSTRACT

Indonesia is a democratic country. One manifestation of democracy is reflected in the general election. Usually in every general election, each of candidate pair (president and vice president) will campaign to attract people ballot for them. Even in some cases identity politics is used as a tool to bring down the opponents. Identity politics is one of political ways that prioritizes the interest of a group because the resemblance of identities in religion, ideologi, race, ethnicity and gender. The occurrence of identity politics in Indonesia can lead to polarization in society. Then what are the efforts to avoid the polarization? In this paper we will discuss how to reconcile identity politics after the 2019 election in Indonesia. This study is a study of library research using qualitative approach in collecting data sources related to research object. The type of research used is phenomenology research. The results of the study indicate that identity politics are still massively used in the campaign that results in society fragmented. Therefore, the purpose of this study is to identify the reconciliation efforts that will be carried out in the community to avoid the occurrence of division.

Key Word: Reconciliation, Identity politic, elections

A. Pendahuluan

Secara umum lahirnya pemilihan umum (Pemilu) berasal dari gagasan John Lock dan Rousseau yang menyebut demokrasi sebagai prinsip kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi setiap individu. Dalam demokrasi terdapat nilai-nilai kedaulatan yang dijunjung tinggi, ditaati serta dijalankan oleh setiap warga negara dan instrumen negara yakni lembaga-lembaga negara yang menjalankan roda pemerintahan. Senada dengan itu, di dalam pelaksanaan Pemilu masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan aktif serta menjadi bagian dari proses demokrasi.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru kemudian muncul gerakan reformasi yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi menyebabkan banyaknya perubahan dalam kehidupan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik. Salah satu perubahan tersebut adalah munculnya fenomena di masyarakat tentang politik identitas. Semua entitas berusaha untuk menunjukkan pandangan dan ekspresi politiknya yang berdasarkan pada identitas pada diri mereka baik identitas agama, etnis, kelompok dan sebagainya.

Setiap negara pasti memiliki warga atau kelompok individu agar negara tersebut dapat berdaulat. Setiap individu pasti memiliki identitas, begitu juga dengan politik, maka dari itu ada yang dinamakan dengan politik identitas. Pada dasarnya politik identitas adalah cara berpolitik dengan mempersatukan kelompok karena merasa adanya ketidakadilan dan ketidakpuasan yang didasari oleh persamaan golongan, seperti agama, suku, ras ataupun gender.

Di Indonesia rasa kesetiaan terhadap agama ataupun etnis masih sangat tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor adanya politik identitas di Indonesia. Isu agama dan etnis tersebut,

sebagaimana dapat dilihat di masyarakat, menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku politik seseorang.

Di Amerika Serikat politik identitas jika dilihat secara substantif dikaitkan dengan adanya kepentingan para anggota dari kelompok-kelompok sosial yang mereka merasa tersingkir bahkan diperlakukan dengan tidak adil oleh kelompok besar yang mendominasi di negara tersebut. Misalnya, gerakan feminisme yang bertujuan dalam memperjuangkan adanya kesetaraan gender, gerakan apartheid, kelompok homo seksual dan beberapa gerakan-gerakan politik identitas kelompok lainnya yang muncul pada sekitar abad ke- 20 ini. Kelompok-kelompok tersebut mengarah kepada adanya dorongan untuk memperjuangkan persamaan hak dan derajat atas kelompok mayoritas.

Indonesia merupakan negara yang berasaskan demokrasi, dengan demikian munculnya politik identitas merupakan salah satu bentuk jalannya demokrasi. Lalu bagaimana muatan politik identitas di Indonesia?

Politik identitas yang terjadi di Indonesia mempunyai dua pola yaitu positif dan negatif atau bahkan destruktif. Untuk kelompok kedua terlihat pada sebagian kelompok-kelompok mayoritas yang berusaha untuk mendominasi kelompok minoritas dengan menyingkirkan atau bahkan memberantas kelompok minoritas. Logika ini dikembangkan berdasarkan pendapat Jacques Derrida yang disebut dengan prinsip "oposisi biner" atau menurut Michel Foucault disebut sebagai "logika strategis" seperti modern-tradisional, superior-inferior, Barat – Timur.²

² Ahmad Syafi'i Ma'arif, dkk, *Politik Identitas Dan Masa Depan prularisme Kita*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), 48

Dalam prinsip tersebut, satu kelompok akan mendominasi lainnya. Kelompok yang pertama akan diunggulkan, diandalkan, bahkan tak sering kali mereka menyanjung-nyanjungnya. Sedangkan dalam kelompok lainnya yakni kelompok minoritas akan direndahkan, dipinggirkan, bahkan mereka akan dilecehkan. Kelompok mayoritas akan dianggap sebagai pusat atau prinsip, sedangkan kelompok minoritas hanya dianggap sebagai marjinal atau bahkan dianggap sebagai musuh.

Seperti yang kita tahu bahwa Pilpres 2014 merupakan Pemilu yang ditandai dengan kuatnya politik identitas yang berkaitan dengan agama, ideologi, dan etnik yang digunakan oleh sebagian aktor dan elite politik untuk menyerang lawan politiknya. Pasca pilpres 2014 politik identitas masih berlanjut hingga pilgub DKI. Kontestasi yang terjadi saat Pilkada DKI Jakarta disinyalir dengan adanya mobilisasi melalui politik identitas. Terutama pasca terjadinya gerakan massa aksi 212.

Sejumlah pengamat berpendapat bahwasannya politik identitas yang terjadi di Indonesia memang sedang marak-maraknya dalam beberapa tahun ini. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya gerakan-gerakan yang konservatif menjelang Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017. Bahkan kegiatan konservatif tersebut terus berlanjut pasca Pilgub DKI Jakarta dan politik identitas ini akan tetap berlangsung hingga Pemilu pada tahun 2019. Adanya rasa khawatir terhadap berkembangnya politik identitas dalam Pemilu 2019 menjadi perhatian tersendiri oleh banyak pihak.

Pemilu pada tahun 2019 berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Pemilu tahun ini merupakan Pemilu yang

istimewa karena diikuti oleh dua kandidat yang telah bertarung pada pilpres sebelumnya. Tidak hanya itu pada Pemilu tahun ini antara pilpres dan pileg dilaksanakan serentak dalam satu waktu. Di Indonesia telah melakukan tiga kali pesta demokrasi secara berturut-turut yakni, pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017, pilgub serentak pada tahun 2018, dan pilpres serta pileg pada tahun 2019.

B. Rumusan masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas tentang maraknya politik identitas yang terjadi di Indonesia, maka penulis tertarik untuk membahas dua rumusan masalah antara lain:

1. Apa dampak politik identitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia?
2. Bagaimana upaya rekonsiliasi politik identitas pasca pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 di Indonesia?

C. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan objek kajian. Dapat diartikan pula sebagai suatu proses untuk menjaring data/ informasi mengenai suatu masalah dalam pembahasan yang berkaitan dengan objek kajian yakni politik identitas dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia baik dalam sumber primer maupun sumber sekunder sebagai data pendukung. Metode berfikir yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dari data atau fakta menuju ke tingkat representasi yang lebih tinggi. Dari representasi tersebut kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang ada.

Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan *Fenomenologi*. Pendekatan *fenomenologi* bertujuan untuk memperoleh pemahaman masyarakat sebagai subyek atas fenomena yang terjadi di masyarakat. Penulis menelaah tentang fenomena politik identitas di Indonesia kemudian penulis akan menganalisis dengan teknik analisis evaluatif dan argumentatif. Teknik analisis evaluatif adalah teknik analisis yang melihat permasalahan dari berbagai pendapat terkait dengan objek pembahasan, sedangkan teknik analisis argumentatif merupakan argumen penulis untuk menjawab permasalahan dengan melihat antara konsep dengan fakta pada objek penelitian.

D. Pembahasan

1. Politik Identitas.

Sebelum membahas tentang politik identitas ada baiknya kita membahas tentang pengertian politik dan identitas secara terpisah. Menurut Andrey Heywood, politik merupakan kegiatan suatu bangsa yang mempunyai tujuan untuk membuat, mempertahankan, serta mengamandemen peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya, yang tidak dapat terlepas dari konflik dan kerja sama³ Definisi tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa masyarakat politik dalam proses membuat keputusan publik tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, maupun antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok berusaha untuk saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang akan disepakati sesuai dengan tujuan dan kepentingan kelompok tertentu.

³ Andrew Heywood dalam Budiardjo Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 16.

Tip O'Neill berpendapat, "*all politics are identities; all identities are political*".⁴ Dalam perspektif konstruktif, identitas adalah sesuatu yang mengalir dan bertambah.⁵ Identitas mempunyai dua arti, yaitu arti praktik dan sebagai arti analisis.⁶ Makna praktis adalah ketika identitas digunakan untuk menunjukkan siapa diri mereka, tentang siapa mereka dan apa kepentingannya. Ketika mereka mengenali diri mereka, identitas tersebut digunakan sebagai alat identifikasi untuk menjadi bagian dari entitas-entitas lainnya yang memiliki kesamaan dan membuat garis terhadap jati diri mereka dan siapa saja yang berbeda dengan mereka.⁷

Sebagai suatu pokok kajian, *study* tentang identitas dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda: *legitimizing identity*, *resistance identity*, dan *project identity*. *Legitimizing identity* mengkaji identitas dari perspektif kelompok atau lembaga yang mempunyai tujuan untuk memperoleh rasionalisasi dan justifikasi terhadap adanya dominasi dan otoritas kelompok lain. *Resistance identity* melihat identitas dari sudut pandang kelompok yang mengalami penindasan dari kelompok lain, dimarginalisasi oleh kelompok yang dominan. *Project identity* menyoroti isu yang membahas tentang transformasi identitas sebagai proyek untuk membangun sebuah perubahan. *Resistance identity* dan *project identity* sangat berkaitan erat dengan tema politik identitas.⁸

⁴ Richard Thompson Ford, *Political Identity as Identity Politics* (Harvard Unbound Vol.1: 53, 2005). 1

⁵ Rogers Brubaker dan Frederick Cooper. *Beyond Identity*. (Theory and Society 29: 1 47, 2000. Kluwer Academic Publisher, 2000) 1

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Purwanto, *Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif*, Jurnal Review Politik Volume 05, Nomor 01, Juni 2015

LA. Kauffman merupakan orang pertama kali menjelaskan tentang hakikat politik identitas dengan cara melacak asal mula gerakan mahasiswa anti kekerasan yang disebut juga dengan SNCC (*the Student Nonviolent Coordinating Committee*), yaitu sebuah organisasi gerakan hak-hak sipil di awal tahun 1960 di Amerika Serikat.⁹ Sedangkan dalam pandangan Gutmann berpendapat bahwa politik identitas terlihat pada gerakan Martin Luther King dan para uskup Katolik di Amerika yang didorong oleh adanya argumen keadilan sosial bukan karena agama.¹⁰

Ada perbedaan antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*). Identitas politik merupakan suatu konstruksi yang dapat menentukan kepentingan di dalam suatu komunitas politik. Sedangkan politik identitas mengacu kepada mekanisme politik baik terhadap identitas politik maupun identitas sosial sebagai sarana politik dalam mewujudkan kepentingan politik¹¹ Agnes Heller berpendapat bahwa politik identitas merupakan langkah politik yang memfokuskan pada perbedaan sebagai kategori utama yang memberi janji kebebasan dan toleransi walaupun pada kenyataannya justru menimbulkan pola-pola intoleransi, pertentangan etnis, dan kekerasan. Politik identitas mencakup rasisme, *environmentalisme* dan perselisihan etnis.¹²

Definisi umum tentang politik identitas merujuk pada praktik politik yang

⁹ L.A. Kauffman, "The Anti-Politics of Identity," *Socialist Review*, No.1, Vol. 20 (Jan.-March 1990), 67-80.

¹⁰ Amy Gutmann, *Identity in Democracy* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2003), 168

¹¹ Haboddin Muhtar, *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*, Jurnal Studi Pemerintahan Volume 3 Nomor 1 Februari 2012

¹² Abdilah, Ubed S, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, (Jakarta: Yayasan Indonesia, 2002), 22

berdasarkan pada kelompok yang berdasarkan pada agama, etnis, denominasi sosial budaya yang kontras terhadap praktik politik yang berdasar pada kepentingan. Politik identitas merupakan wacana yang sangat menarik untuk dibahas mengingat pada akhir-akhir ini politik identitas sering muncul ditengah-tengah masyarakat. Terutama setelah terjadinya konflik kekerasan yang melibatkan berbagai kelompok.

Politik identitas merupakan proses penyatuan dari berbagai identitas dalam *self concept* dan *self image*. Selain itu politik identitas dibangun sebagai gambaran stereotype lingkungan. Dengan demikian politik identitas memiliki dua hal penting. *Pertama*, bahwa adanya reformasi dan demokrasi menghasilkan nilai pluralisme terhadap kaum minoritas yang termarginalkan sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang sama. *Kedua*, pengakuan dari berbagai identitas tidak lagi dianggap sebagai alat national building, akan tetapi justru hal tersebut akan merusak identitas nasional.¹³

Keberadaan politik identitas selalu dikaitkan dengan afiliasi kelompok. Dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari adanya upaya untuk memasukkan nilai-nilai religiusitas dalam proses pembuat kebijakan, termasuk adanya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariah. Tidak hanya itu bahkan terkadang terdapat beberapa daerah atau kota yang menyebut daerah atau kota tersebut dengan memberikan unsure agama di dalamnya. Secara umum, dalam sejarah dunia politik identitas banyak dibentuk oleh faktor ideologi maupun ras tertentu. Faktor lain dalam pembentukan politik identitas adalah adanya penguatan kelas tertentu seperti dalam bentuk penguatan kelas ekonomi.

¹³ Ibrahim, *Dari Politik Identitas ke Politik Kewarganegaraan*, (Jogjakarta: Danadyaksa, 2013), 2

Kecenderungan berkembangnya politik identitas tidak berkait dengan sistem politik tertentu. Di Indonesia perkembangan politik identitas berkembang subur karena adanya kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Praktik politik identitas dapat dikenali melalui berbagai bentuk. Sebagian orang berpendapat bahwa munculnya pembentukan partai nasional yang berbasis agamadan daerah administrative atas dasar ikatan etnis merupakan indikasi terjadinya kecenderungan politik identitas.

Pola operasionalisasi politik identitas terjadi dapat dilihat pada relitas di masyarakat Indonesai saat ini karena banyak terjadi benturan dengan berbagai kepentingan dan fenomena ego sektoral masyarakat. Pola tersebut dibagi ke dalam tiga komponen yaitu: *Pertama*, operasional politik identitas tersebut memainkan peranannya secara optimal melalui pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan adanya pergeseran pola sentraisasi menjadi desentralisasi, dimana pemerintah pusat memberi kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sisi positif dari hal ini adalah pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi daerah mereka, akan tetapi dilain sisi dapat menimbulkan keresahan jika identitas politik kedaerahan diangkat ke dalam panggung politik.¹⁴

Kedua, agama menjadi lahan operasional politik identitas. Tidak hanya di Indonesia, namun di negara lain berlakunya politik identitas yang menggunakan agama sangat marak dilakukan. Di Indonesia operasional politik identitas agama ini dilakukan oleh kelompok agama mayoritas terhadap kelompok agama minoritas. Kemudian disusul dengan adanya gerakan-gerakan

radikal yang mengatasnamakan agama tersebut.¹⁵

Ketiga, politik identitas dalam ranah hukum. Dalam wilayah ini sangatlah kompleks, seperti pisau bermata dua. Maksud dari wilayah hukum adalah wilayah negara dan agama dimana keduanya memiliki aturan-aturan sendiri. Dalam hal ini cara beroperasi politik identitas adalah dengan pembagian kekuasaan dimana kelompok-kelompok tertentu memasukkan kepentingannya secara partikular.¹⁶

Diantara banyaknya identitas dari seseorang, identitas yang sering ditampilkan adalah identitas agama dan etnik. Kedua identitas tersebut akan selalu mendapatkan ruang tersendiri. Dalam konsep identitas situasional menjelaskan bahwa setiap orang akan melakukan komunikasi dengan melakukan pertukaran simbol dalam keseharian mereka, dan antara agama dan etnik tidak dapat dipisahkan dalam komunikasi tersebut.

Bagi kalangan instrumentalisme adanya identitas agama dan etnik senantiasa dijadikan alat oleh kalangan elit untuk kepentingan mereka sendiri. Pandangan ini mengasumsikan bahwa kaum minoritas akan dijadikan alat untuk menguntungkan kelompok mayoritas.¹⁷ Di Indonesia agama dan etnik merupakan politik identitas yang sangat kental terjadi. Dua hal ini merupakan alat yang sangat ampuh untuk menarik massa dan untuk menimbulkan sentimen antara satu sama lainnya. Tidak heran jika dalam tahun politik dua hal ini yang marak dibahas oleh aktor politik dalam berkampanye.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Endang Sari, *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*, KRITIS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin, Volume 2 No. 2 Desember 2016, 150

¹⁴ Zahrotunnimah, *Pola Operasionalisasi Politik Identitas di Indonesia*, Adalah, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 2 no 11b 2018, 104

2. Fenomena Politik Identitas dalam Pelaksanaan Pemilu 2019

Pemilu merupakan alat demokrasi yang bertujuan memilih wakil rakyat maupun pemimpin negara. Pemilu harus tunduk pada ketentuan konstitusi sebagai wujud pelaksanaan demokrasi konstitusional dalam memilih pemimpin, baik dalam tingkat nasional maupun dalam tingkat daerah. Pemilu sebagai sebuah mekanisme maka dalam pelaksanaannya diharapkan dapat dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil. Akan tetapi pelaksanaan Pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Hal tersebut terlihat dalam cara-cara kampanye para aktor-aktor politik. Terjadi perdebatan politik identitas soal suku, ras, agama serta meningkatnya suasana sektarian yang terjadi di berbagai media sosial.

Kampanye merupakan suatu kegiatan yang tidak lepas dalam kompetisi politik sebagai cara untuk mensosialisasikan para aktor politik yang berkompetisi. Berbagai cara yang mereka lakukan untuk menarik suara dan simpati masyarakat baik secara langsung maupun memanfaatkan sosial media. Salah satu cara dalam menarik simpati dan menjatuhkan lawan politik adalah dengan cara membuat isu politik identitas.

Acuan literatur baik dalam literatur politik maupun literatur sosiologi mengkategorikan identitas menjadi dua kategori, yaitu: *pertama*, identitas sosial yang meliputi agama, ras, etnis, kelas, gender dan seksualitas. *Kedua*, identitas politik meliputi nasionalitas dan kewarganegaraan. Identitas sosial menentukan posisi setiap individu baik dalam komunitas maupun dalam masyarakat luas melalui rasa kepemilikan, sekaligus menandai posisi individu yang lain sebagai suatu pembeda. Adanya identitas juga dapat membuat sekelompok tersebut berbeda dengan kelompok lainnya, maka dengan

demikian hal ini berkaitan erat dengan adanya kontruksi perbedaan.¹⁸

Pada Pemilu 2014 dan 2019, permasalahan ras, etnis, agama telah dieksploitasi oleh para pegiat politik. Efek dari strategi ini telah diperkuat oleh penggunaan politik identitas yang disebarkan dengan cepat melalui media sosial. Dalam Pemilu, politik identitas merupakan bagian dari strategi kampanye. Dengan demikian maka tidak hanya solidaritas sosial namun pondasi demokrasi negara juga dipertaruhkan.

Salah satu tantangan bangsa kita saat ini ialah timbulnya fanatisme suku, agama, dan ras, serta kurangnya penghargaan kebhinekaan yang mencerminkan kemajemukan. Tantangan kebangsaan tersebut tampak dalam kontestasi politik. Hal tersebut dapat dilihat pada politik identitas dalam bentuk SARA yang dijadikan alat kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Fenomena yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta merupakan kemenangan politik identitas. Isu SARA dijadikan alat politik guna menarik suara masyarakat dan dijadikan sebagai medium konflik yang didukung oleh propaganda secara masif. Rumah ibadah yang seharusnya menjadi tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah justru digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan kampanye politik bahkan tak jarang rumah ibadah dijadikan tempat menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain. Tidak hanya dalam lingkup agama, bahkan adanya perbedaan suku yang seharusnya menyadarkan kita atas adanya keberagaman, malah dijadikan sebagai salah satu cara untuk menarik simpati dengan mendiskriminasi suku lainnya.

¹⁸ Fitri Ramdhani Harahap, *Politik Identitas Berbasis Agama*, Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III Transformasi Demokrasi Indonesia Menuju Perubahan Yang Bermakna, Yogyakarta, 20-22 Mei 2014, 519.

Pilkada DKI Jakarta 2017 dianggap babak awal untuk memperebutkan kekuasaan yang akan dilakukan pada Pemilu 2019. Hal tersebut karena DKI Jakarta merupakan titik utama dalam konstelasi politik yang melibatkan seluruh instrumen politik nasional dalam dinamikanya. Jakarta sebagai Ibu Kota menjadi daya tarik elite politik nasional dalam melakukan manuver politiknya. Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat menguras energi bangsa, efek yang ditimbulkan akibat permainan isu SARA hingga ke berbagai penjuru negeri. Totalitas dalam pertarungan politik para elite parpol menjadi pertarungan untuk melancarkan agenda sesungguhnya dalam Pilpres 2019.

Sejak berkampanye dalam Pilpres 2014, Jokowi telah dituduh sebagai sosok yang tidak cukup religius bahkan diisukan sebagai seseorang yang membenci Ulama. Untuk melawan asumsi yang berkembang di masyarakat tersebut, ia mencalonkan Ma'ruf Amin yang merupakan ulama konservatif untuk mendampinginya sebagai kandidat wakil presiden pada Pemilu 2019. Selain agama dan ras, Pemilu 2019 juga telah membuka tentang peristiwa masa lalu. Prabowo diisukan sebagai sosok yang otoriter, dan mempunyai koneksi dengan keluarga Soeharto, hal yang dikhawatirkan apabila Prabowo terpilih adalah akan terulang kembali pemerintahan yang otoriter seperti pada era orde baru. Selain itu, isu Prabowo berasal dari keluarga Nasrani juga dihembuskan ke permukaan. Kedua kubu sama-sama telah menggunakan isu politik identitas tersebut.

Akan menjadi hal yang berbahaya apabila pemimpin politik memanfaatkan situasi sosial yang beredar di masyarakat untuk kepentingan meraup suara semata. Memainkan politik identitas seperti ras, suku, dan agama sebagai bahaya kampanye di masyarakat. Cara tersebut akan memberikan dampak yang buruk,

yakni akan terciptanya polarisasi ras, suku, dan agama yang semakin besar.

Oleh karena itu adanya kekhawatiran terhadap penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2019 memiliki alasan yang kuat. Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu pada tahun 2018 yang mengidentifikasi terdapat beberapa daerah yang mempunyai potensi menimbulkan kerawanan pilkada 2018. IKP melakukan pembobotan pada tiga dimensi antara lain, partisipasi, kontestasi, dan penyelenggaraan. 5 kerawanan tertinggi adalah Papua (3,41), Maluku (3,25), Kalimantan Barat (3,04), Sumatera Utara (2,86) dan Sulawesi Tenggara 2,81). Dalam Pemilu presiden 2019 Bawaslu memasukkan dimensi kerawanan SARA sebagai salah satu aspek dalam pilkada.¹⁹

3. Dampak Politik Identitas Terhadap Negara

Berbicara tentang politik identitas tak lepas dengan adanya jati diri, pentingnya jati diri diletakkan sebagai basis entitas dan menjadi dasar dalam memperjuangkan dirinya dalam kontestan politik. Hal ini menunjukkan bahwa munculnya politik identitas adalah wujud dari adanya jati diri sebuah kelompok sosial yang bergeser menjadi kekuatan politik.

Ada beberapa pendapat tentang sahsah saja menggunakan isu politik identitas dalam Pemilu. Dalam pendapat tersebut dituliskan bahwa politik identitas dalam negara yang berasaskan demokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Kemunculan politik identitas merupakan sebuah konsekuensi logis terhadap penerapan faham demokrasi negara tersebut.

¹⁹ Arya Fernandes, *Politik Identitas dalam Pemilu 2019 Proyeksi dan Efektivitas*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 4

Asas demokrasi yang paling penting adalah adanya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang sangat dijunjung tinggi oleh negara. Salah satu dari hak-hak tersebut adalah adanya *freedom of expression* yang menjamin setiap warga negara untuk dapat menentukan preferensi politiknya. *Freedom of expression* adalah dasar bagi individu-individu yang merasa memiliki kesamaan baik dalam hal ideologi, pemikiran, maupun identifikasi tertentu yang kemudian mereka sepakat untuk membentuk satu identitas yang bertujuan mengartikulasikan kepentingan yang berdasarkan pada identitas tersebut.²⁰

Pada dasarnya isu politik identitas dapat digunakan dalam mengekspresikan demokrasi sepanjang isu tersebut tetap dalam koridor yang wajar dan tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, mengingnt dalam realitas sosial identitas merupakan hal tidak bisa lepas dari kehidupan di masyarakat. Namun sebaliknya, apabila isu politik identitas digunakan secara berlebihan serta identitas tersebut dimanipulasi untuk menjatuhkan lawan politik serta membenturkan kelompok satu dengan kelompok lainnya, maka hal ini akan menimbulkan terjadinya polarisasi di masyarakat

Pada akhirnya polarisasi ini dapat menumbuhkan rasa eksklusif pada kelompok-kelompok tersebut yang berdasarkan pada etnis ataupun ideologi tertentu. Saat ini politik identitas sering digunakan untuk mempertajam adanya perbedaan-perbedaan di masyarakat yang mengarah pada isu SARA, khususnya isu-isu yang paling sensitif yakni isu agama dan isu etnisitas. Politik identitas merupakan cara yang paling efektif dalam membangkitkan jati diri kelompok tertentu untuk mendapatkan dukungan yang bersifat emosional.

Apabila politik identitas ini dibiarkan berkembang secara massif dengan cara saling menjatuhkan kelompok satu dengan yang lainnya maka besar kemungkinan akan terkoyaknya kebhinekaan yang ada di Indonesia. Hal ini sudah dibuktikan dengan terjadinya politik identitas di Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Meskipun pilkada telah usai, namun perselisihan antar kelompok tetap terjadi hingga saat ini.

Menjelang pilpres 2019 politik identitas makin marak didengungkan. Hal itu membuat masyarakat kita terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pendukung masing-masing paslon dan kelompok yang tidak mendukung keduanya. Ketiga kelompok ini semakin panas baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Oleh karena itu diperlukan kontrol pemerintah guna menanggulangi terjadinya perpecahan di masyarakat. Secara politik, kelompok-kelompok yang terpecah menjadi beberapa kubu tersebut perlu disadarkan dan dimunculkan rasa nasionalisme yang kuat terhadap negara guna menghindari *divide et impera*.

Berbeda Syafi'i Ma'arif yang berpendapat bahwa politik identitas dalam bentuk apapun tidak akan membahayakan terhadap keutuhan bangsa dan negara selama cita-cita pendiri bangsa tentang persatuan, integritas nasional, semangat sumpah pemuda yang telah melebur menjadi satu dalam sentimen kesukuan dan Pancasila sebagai landasan filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang. Yang menjadi permasalahan ialah tanggung jawab tersebut sering dipermainkan mereka yang larut dalam pragmatisme politik yang tuna moral dan tuna visi. Sikap seperti inilah yang menjadi musuh besar bagi bangsa Indonesia semenjak dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang.²¹

²⁰Rendy Adiwilaga, dkk, *Pemilu Dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jurnal Bawaslu, Vol.3 No. 2 2017, Hal. 269-284, 274

²¹ Ahmad Syafi'I Ma'arif, dkk, *Politik Identitas Dan Masa Depan Prularisme Kita*, 30

Ancaman terhadap maraknya politik identitas dengan isu SARA merupakan permasalahan utama dalam dunia politik, hukum serta keamanan negara. Oleh karena itu pemerintah beserta lembaga-lembaga negara lainnya harus tetap profesional dan berorientasi mengedepankan sikap netral dalam menghadapi isu politik identitas dengan tidak berpihak membela salah satu diantar mereka demi terjaganya keamanan negara.

4. Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Indonesia

Politik identitas dapat terkikis apabila nilai-nilai demokrasi menjadi perangkat lunak dalam melakukan kompetisi untuk memperebutkan kursi pemerintahan guna mewujudkan kepentingan publik. Yang terjadi saat ini adalah seringkali para kontestan politik tidak berkorelasi positif dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat luas. Sudah seharusnya para kontestan politik berada argument tentang keunggulan visi misi yang mereka usung yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat seperti dalam hal ekonomi, kesehatan, birokrasi, penegakan hukum secara adil dan lain sebagainya. Politik identitas perlu dihindari kerana hal tersebut merupakan isu yang sangat sensitif dalam masyarakat.

Para kontestan Pemilu sebaiknya membantu dalam mengkampanyekan tindakan anti diskriminasi dalam masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya kesadaran masyarakat tentang anti diskriminasi masih rendah. Rendahnya pemahaman mereka tentang sikap anti diskriminasi sangatlah memprihatinkan karena kita memiliki Undang-undang nomor 40 tahun 2008 yang membahas tentang penghapusan diskriminasi, ras dan etnis. Dalam undang-undang tersebut dengan jelas diatur ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindakan diskriminatif baik berupa ucapan maupun

tingkah laku dapat diancam hukuman penjara selama 1 tahun. Selain itu apabila ada seseorang yang menunjukkan kebenciannya terhadap ras atau etnis tertentu maka orang tersebut mendapatkan ancaman selama 5 tahun penjara.

Masyarakat dan para kontestan Pemilu harus mengetahui adanya aturan tersebut. Karena penggunaan politik identitas dalam kampanye berpotensi dalam melanggar UU anti diskriminasi. Selain itu penggunaan politik identitas dalam berkampanye akan menimbulkan banyak kemudlaratan dan dapat memecah belah bangsa dan negara. Masyarakat tidak lagi fokus terhadap visi dan misi para kontestan Pemilu, akan tetapi mereka akan memilih berdasarkan sentimen agama atau etnik.

Dalam berkampanye yang seharusnya diunggulkan adalah visi misi dalam membangun bangsa dan negara yang ditawarkan oleh masing-masing kontestan Pemilu. Agar masyarakat tau mana yang lebih layak untuk dipilih dalam membangun bangsa dan negara, bukan malah memainkan isu politik identitas yang justru membuat demokrasi semakin memanas.

Dalam negara Indonesia politik identitas dengan menggunakan isu SARA sangat berpotensi untuk menciptakan konflik dan perpechan dalam masyarakat. Kuatnya rasa memiliki terhadap budaya dan daerah tertentu, primordialisme serta rendahnya rasa toleransi harus segera diatasi guna mencegah terciptanya disintegrasi terhadap negara. Terlebih lagi mengingat bahwa negara Indonesia mempunyai banyak pulau yang di dalamnya terdapat berbagai suku dengan bahasa lokal, dan keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia seharusnya dipandang sebagai suatu kekayaan dan kekuatan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat kita perlu menghindari konsep politik identitas dalam pelaksanaan Pemilu demi kehidupan berbangsa dan bernegara

agar lebih baik. Apabila politik identitas tetap dijadikan sebagai alat kampanye maka hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi integritas dan pluralisme masa depan bangsa. Dengan demikian adanya rekonsiliasi akibat terjadinya konflik identitas perlu dilakukan dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat.²²

Dalam proses rekonsiliasi membutuhkan suatu perspektif untuk dapat melihat permasalahan yang terjadi, wacana-wacana yang berkembang di masyarakat, maupun usaha-usaha yang telah dilakukan. Untuk mewujudkan keberhasilan rekonsiliasi sangat diperlukan setiap pihak untuk dapat terlibat. Salah satunya adalah peran para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pendapat para tokoh tersebut mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk pola pikir di masyarakat.

Dalam konferensi pers ketua umum PBNU Said Aqil Siradj bersama ormas Islam lainnya yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menyampaikan mengajak masyarakat untuk dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional. Selain itu diharapkan kepada seluruh komponen bangsa untuk segera melakukan rekonsiliasi pasca pemungutan suara, terutama para ulama, kiai, dan ustad untuk menghindari perpecahan yang terjadi di masyarakat. Ketua PP Muhammadiyah juga turut menyikapi kondisi politik pasca Pemilu. Haedar Nasir menghimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan banyaknya hasil quick count dan exit poll di media massa dan media sosial. Ketua umum Al-Irsyad, Abdullah Jaidi mengajak semua pihak untuk lebih mengedepankan akhlak di dalam menyikapi permasalahan yang

terjadi saat ini serta tidak terprovokasi dengan berita-berita di media sosial.²³

Hal ini juga ditegaskan oleh wakil Presiden Jusuf Kalla, Jusuf Kalla berharap bahwa kedua capres yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto untuk segera melakukan rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. pertemuan antara keduanya sangat penting untuk dapat mendamaikan kembali masyarakat yang telah terbelah karena Pilpres 2019. Semakin cepat pertemuan dilakukan maka akan semakin baik.²⁴

Pemilu tahun 2019 merupakan momentum penting bagi bangsa, tidak hanya dalam konteks pelaksanaan suksesi kekuasaan tertinggi atau sirkulasi kekuasaan legislatif, namun juga bagi terwujudnya demokrasi secara lebih luas. Pasca Pemilu 2019 kita dihadapkan pada dua pilihan yaitu Pemilu yang berujung pada rekonsiliasi; atau justru menuju kepada polarisasi dalam masyarakat. Masyarakat tentu berharap bahwa langkah yang ditempuh adalah rekonsiliasi. Untuk mewujudkan rekonsiliasi langkah yang harus dilakukan adalah dimulai dari para kontestan politik pada Pemilu 2019. Pihak yang menang dalam Pemilu tidak semena-mena dengan kemenangan yang didapat, termasuk timses dan pendukungnya tidak mencemooh atau menghina pihak yang kalah. Sedangkan pihak yang kalah harus ikhlas menerima kekalahan dan tidak memperkeruh suasana dengan menggiring opini masyarakat untuk bersikap apatis kepada lembaga pelaksana Pemilu.

²² Debora Sanur L, *Rekonsiliasi Politik Identitas di Indonesia*, Majalah Info Singkat pemerintahan Dalam Negeri, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. IX, No. 10/II/Puslit/Mei/2017, 18.

²³<https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/04/2019/pilpres-2019-sudah-selesai-saatnya-rekonsiliasi-nasional/> diakses pada 23 April 2019

²⁴ <https://news.detik.com/berita/d-4520816/dorong-rekonsiliasi-ormas-islam-harap-jokowi-dan-prabowo-segera-bertemu> diakses pada 23 April 2019

E. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 isu politik identitas masih marak digunakan. Hal ini berawal dari Pemilu 2014 yang berlanjut kepada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada Pilkada DKI 2017 politik identitas sangat marak di Indonesia. Suku, agama dan ras dijadikan alat untuk menarik simpati dan menjatuhkan lawan politiknya. Politik identitas tersebut berlangsung hingga Pemilu 2019.

Secara faktual, bagi sebagian masyarakat politik identitas merupakan hal yang wajar karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural. Akan tetapi politik identitas akan menjadi masalah apabila dalam prakteknya menjurus kepada tindakan diskriminasi kepada kelompok tertentu. Dampak dari adanya politik identitas ini adalah terjadinya polarisasi di masyarakat. Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan membahayakan kedaulatan negara Indonesia.

Oleh karena itu hal yang harus dilakukan untuk merajut kembali perpecahan tersebut adalah dengan upaya rekonsiliasi yang diawali oleh para kontestan politik. Selain para kontestan politik peran para tokoh masyarakat dan tokoh agama sangatlah penting. Karena pendapat para tokoh tersebut mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk pola pikir di masyarakat.

F. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis mengajukan rekomendasi yang dipandang bermanfaat dalam upaya melakukan rekonsiliasi pasca pelaksanaan Pemilu 2019:

- a) Tetap menjaga kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar
- b) konstitusi selama menunggu hasil perhitungan resmi dari lembaga penyelenggara Pemilu. Apabila ada permasalahan maka diselesaikan dengan jalur hukum.
- c) Adanya pertemuan terbuka dari kedua kontestan politik guna mendamaikan masyarakat yang telah terpecah. Dan juga pertemuan antara dua kubu yang bersaing serta pertemuan para tokoh agama dengan kedua kontestan politik.
- d) Menghimbau kepada masing-masing tim sukses dan pendukung untuk tidak saling menyerang dalam segala hal, terutama dalam hal suku, agama dan ras yang akan semakin memecah belah masyarakat.
- e) Menghentikan aksi-aksi mobilitasi massa yang menjurus kepada maraknya kembali politik identitas.
- f) Kembali kepada kesadaran bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, bahwa Indonesia adalah milik semuanya bukan milik kelompok tertentu.
- g) Memberikan edukasi politik yang baik dan menanamkan rasa kebhinekaan. Dengan begitu maka akan terbentuk kesadaran masyarakat untuk menggunakan cara-cara yang baik dalam berpolitik dan mengedepankan prinsip kebangsaan terhadap eksistensi NKRI.

Sedangkan upaya untuk mencegah politik identitas dalam Pemilu kedepan adalah perlunya regulasi terhadap sistem hukum Pemilu yang mengadopsi prinsip-prinsip penting yang ada dalam UU salah satunya tentang penghapusan diskriminasi suku, agama, dan ras.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdilah, Ubed S, 2002, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Jakarta, Yayasan Indonesia
- Ahmad Syafi'I Ma'arif, dkk, 2012, *Politik Identitas Dan Masa Depan prularisme Kita*, Jakarta, Democracy Project
- Budiardjo, Miriam, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Fernandes, Arya, 2018, *Politik Identitas dalam Pemilu 2019 Proyeksi dan Efektivitas*, Jakarta, Centre for Strategic and International Studies
- Ford, Richard Thompson, 2005, *Political Identity as Identity Politics*, Harvard Unbound, Vol. 1: 53
- Gutmann, Amy, 2003, *Identity in Democracy*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press
- Ibrahim, 2013, *Dari Politik Identitas ke Politik Kewarganegaraan*, Jogjakarta, Danadyaksa
- Rogers Brubaker dan Frederick Cooper, 2000, *Beyond Identity. Theory and Society*, Kluwer Academic Publisher.

Jurnal

- Debora Sanur L, *Rekonsiliasi Politik Identitas di Indonesia*, Majalah Info Singkat pemerintahan Dalam Negeri, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. IX, No. 10/II/Puslit/Mei/2017
- Harahap, Fitri Ramdhani, *Politik Identitas Berbasis Agama*, Proceeding Konferensi Nasional Sosiologi III, Transformasi Demokrasi Indonesia

Menuju Perubahan Yang Bermakna, Yogyakarta, 20-22 Mei 2014.

- L.A. Kauffman, "The Anti-Politics of Identity", *Socialist Review*, No.1, Vol. 20, Jan.-March 1990.
- Muhtar, Haboddin, *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*, Jurnal Studi Pemerintahan Volume 3 Nomor 1 Februari 2012
- Purwanto, *Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif*, Jurnal Review Politik Volume 05, Nomor 01, Juni 2015
- Rendy Adiwilaga, dkk, *Pemilu Dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jurnal Bawaslu, Vol.3 No. 2 2017
- Sari, Endang, *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*, KRITIS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin, Volume 2 No. 2 Desember 2016
- Zahrotunnimah, *Pola Operasionalisasi Politik Identitas di Indonesia*, Adalah, Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 2 no 11b 2018

Website

- <https://www.jawapos.com/nasional/politik/20/04/2019/pilpres-2019-sudah-selesai-saatnya-rekonsiliasi-nasional/> diakses pada 23 April 2019
- <https://news.detik.com/berita/d-4520816/dorong-rekonsiliasi-ormas-islam-harap-jokowi-dan-prabowo-segera-bertemu> diakses 23 April 2019